HASIL MUSRENBANG MULAI DIKERUCUTKAN

Tahun Depan Pemkot Fokus SDM, Layanan Publik dan Kesejahteraan

YOGYA (KR) - Hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat wilayah kini mulai dikerucutkan di tingkat kota. Terutama untuk disesuaikan dengan fokus arah pembangunan yang akan dilakukan Pemkot Yogya di tahun depan yakni urusan sumber daya manusia (SDM), layanan publik dan kesejahteraan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Agus Tri Haryono, prioritas tersebut merujuk pada tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogya 2025. Tema itu ialah pemantapan pembangunan manusia dengan dukungan layanan publik berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat. "Dengan keterbatasan sumber daya alam dan luas wilayahnya yang sempit, maka fokusnya adalah bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan. Termasuk di dalamnya afirmasi kelompok rentan yaitu warga miskin, perempuan, anak, disabilitas dan lansia sebagai bagian dari masyarakat berhak mendapatkan akses yang setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan," urainya, Minggu (24/3).

Musrenbang di Kota Yogya sudah dilakukan sejak Januari lalu dari tingkat kelurahan. Kemudian dilanjutkan di tingkat kemantren. Selain itu digelar juga musrenbang tematik kemiskinan, penyandang disabilitas serta anak. Seluruh hasil dari tiap jenjang itu lantas disatukan di tingkat kota sebagai dasar penyusunan RKPD tahun depan.

Agus menambahkan, dari tiga aspek utama dalam RKPD 2025, di dalamnya juga meliputi peningkatan perekonomian inklusif dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2023 angka kemiskinan ekstrem di Kota Yogya turun 0,50 dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 3.010 KK menjadi 2.260 KK. "Selain itu juga pemantapan sarana dan prasarana di wilayah yang fokusnya pada pengelolaan persampahan. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik seiring perkembangan kebutuhan dan teknologi, serta isu yang menerapkan konsep perencanaan tematik, holistik, integratif, dan spasial berkaitan dengan branding kawasan cagar budaya dan dukungan terhadap sumbu filosofi," paparnya.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, menyampaikan musrenbang bertujuan untuk menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap sasaran tujuan program pembangunan daerah. Isu strategis di tahun 2024 hingga 2025 beberapa di antaranya adalah berkaitan soal pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan kemiskinan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. "Pengelolaan sampah berkaitan dengan kebijakan desentralisasi sampah yang sebentar lagi akan berlaku. Kemudian peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan memberikan jaminan keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang, meningkatkan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, juga peningkatan ekonomi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Selain itu, lanjut Singgih juga berkaitan dengan pengembangan kawasan cagar budaya yang menjadi isu strategis untuk ditangkap sebagai peluang untuk pengembangan ekonomi, pariwisata dan budaya. Terutama penetapan sumbu filosofi sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO yang harus didukung dengan upaya pelestarian dan pengembangan.

Menurutnya dalam penyusunan RKPD benar harus berdasarkan isu dan tantangan yang dihadapi saat ini masa datang. Dengan semangat kolaborasi dan sinergi seluruh perangkat daerah dan unsur masyarakat untuk pembangunan daerah yang tepat tuju, tepat sasaran dan tepat mutu. **(Dhi)-f**

Gerakan Kampung Pantib Sasar 146 Kampung

YOGYA (KR) - Hampir seluruh kampung di Kota Yogya telah mendeklarasikan gerakan kampung panca tertib (pantib). Hingga saat ini totalnya sudah mencapai 146 kampung dan tinggal menyisakan sekitar 20 kampung.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Yogya Suwarna, mengatakan pada tahun 2024 ini pihaknya akan menambah 12 kampung untuk didorong menjadi kampung pantib di Kota Yogya. "Harapan kami besok di tahun 2026 seluruh kampung di Kota Yogya sudah mendeklarasikan sebagai kampung panca tertib. Sehingga program ini benar-benar bisa menjadi gerakan dari masyarakat dari basis kampung," jelasnya, Minggu (24/3).

Ia mengungkapkan pembentukan kampung panca tertib adalah sebagai upaya dalam mewujudkan ketertiban di lingkungan masyarakat. Gerakan tersebut juga untuk mengajak masyarakat mengatasi masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi tanggung jawab bersama.

"Keunggulan dari kampung panca tertib ini adalah mampu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama serta memberikan ruang partisipasi maksimal pada cipta kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berbasis kampung," tandasnya.

Pihaknya pun siap memberikan fasiltas pendampingan pelaksanaan gerakan kampung panca tertib yang akan dilakukan oleh fasilitator dari Sat Pol PP Kota Yogya. Termasuk memfasilitasi kegiatan deklarasi gerakan kampung panca tertib mulai dari persiapan hingga pelaksanaan.

Sebagai informasi gerakan kampung panca tertib digagas Pemkot Yogya melalui Sat Pol PP sejak tahun 2015. Gerakan tersebut merupakan aktivitas sosial berbasis kampung untuk mewujudkan komitmen lima unsur ketertiban yakni tertib bangunan, tertib daerah milik jalan, tertib usaha, tertib lingkungan, dan tertib sosial. "Setiap kampung bisa menentukan fokus ketertiban yang dipilih disesuaikan kondisi dan karakteristik masing-masing kampung. Diharapkan dengan semakin banyaknya kampung panca tertib akan tercipta rasa aman dan nyaman di masyarakat dan di Kota Yogya," tandasnya.

Misalnya unsur ketertiban yang dipilih dan disepakati bersama oleh pengurus kampung ialah tertib bangunan, maka teknis yang dikawal bisa meliputi ketertiban izin mendirikan bangunan maupun kelaikan fungsi bangunan. Begitu pula jika di kampung itu banyak terdapat indekos maka bisa memilih tertib sosial. Dengan begitu bisa lebih fokus pada kesesuaian aturan kos-kosan mulai perizinan, induk semang hingga pergaulan anak kos. Hanya, pada masa darurat sampah ini kampung didorong agar turut serta fokus pada tertib lingkungan guna meminimalisir persoalan sampah liar.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, masing-masing kampung sudah menetapkan pelopor ketertiban dan menjadi garda terdepan dalam mengawal gerakan itu. **(Dhi)-f**

SARASIJA STUDENT COMPANY GANDENG CV CIPTA REKSA MULIA

Olah Limbah Plastik Menjadi Bahan Utama Pembuatan Sabun Alami

KR-Istimewa

Tim Sarasija Company SMAN 3 Yogyakarta.

YOGYA (KR) - Sarasija Company, sebuah perusahaan yang dikelola oleh siswa SMA Negeri 3 Yogyakarta terus melakukan inovasi untuk meningkatkan mutu produk dan mengembangkan bisnisnya. Saat ini Sarasija Company menjalin kerja sama dengan CV Cipta Reksa Mulia dalam pengolahan (daur ulang) limbah plastik menjadi serbuk/abu plastik (karbon aktif).

Rizqi Wanita Sofiana, siswa SMAN 3 Yogyakarta sekaligus Vice President of Public Relations Sarasija Company menuturkan, Sarasija Company memiliki produk sabun alami 'Vikasati' dengan bahan baku limbah plastik sebagai karbon aktif. Limbah plastik tersebut, salah satunya dari plastik dari cup/penutup gelas kopi starbucks.

Melalui inovasi teknologi, siswa mampu membuat sabun alami dengan pemanfaatan serbuk/abu plastik sebagai karbon aktif. Setelah melalui proses quality control, sabun Vikasati telah lolos uji mutu sesuai standar SNI yang artinya sabun tersebut aman diaplikasikan ke tubuh. "Kualitas serbuk plastik yang dihasilkan oleh mitra kami (CV Cipta Reksa Mulia) sangat bagus untuk kita olah menjadi sabun," terang Sofiana kepada KR, Minggu (24/3).

Menurut Sofiana, sejak diluncurkan pada Desember 2023, Sarasija Company telah berhasil menjual puluhan sabun Vikasati kepada konsumen. Selain sebagai wadah untuk mengembangkan potensi diri sesuai bakat dan minat para anggotanya (siswa SMAN 3 Yogya), Sarasija Company juga mempunyai misi memenangkan kompetisi kewirausahaan pelajar di tingkat nasional bahkan Asia Pasific, melalui ide ini.

Sementara itu, Danang Wahyu Wibowo ST selaku Direktur Utama CV Cipta Reksa Mulia menyambut baik kerja sama dengan Sarasija Company. Menurutnya, CV nya bergerak di bidang teknik sipil, di mana salah satu sayap usahanya adalah Among Sampah yang melayani jasa pengolahan/pemusnahan sampah. Ia memiliki alat incinerator portable yang mampu membakar sampah hingga volume 1 kubik dalam waktu 1,5 jam.

"Karena portable, kami bisa menjangkau koosumen di lingkungan padat penduduk. Alat incenerator portable kami sudah dilengkapi dengan pencuci asap (wet scrubber) untuk meminimalisir kandungan zat berbahaya yang keluar," ujarnya.

Khusus untuk membakar limbah sampah plastik dari siswa SMAN 3 Yogya ini, karena volumenya tidak banyak, hanya butuh waktu 30 menit saja. CV Cipta Reksa Mulya sendiri berlokasi di Padukuhan Pojok, Sinduadi Mlati Sleman yang jaraknya tidak terlalu jauh dari SMAN 3 Yogyakarta. "Kami berharap kerja sama ini bisa berkelanjutan karena sangat efektif dalam mengurangi volume sampah di Yogyakarta," ujarnya. **(Dev)-f**

DIY Rawan Bencana Hidrometeorologi Siklon Tropis

KR-Juvintarto

Konsultasi Publik Rencana Kontingensi Bencana Hidrometeorologi Siklon Tropis DIY.

YOGYA (KR) - Meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap ancaman bencana siklon tropis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY bekerjasama dengan World Food Programme (WFP) menginisiasi kegiatan Konsultasi Publik Rencana Kontingensi Bencana Hidrometeorologi Siklon Tropis DIY, Kamis (21/3) di Grand Mercure Yogyakarta di Jalan Laksda Adisucipto No 80 Yogya.

"DIY merupakan wilayah yang sering kali terkena dampak bencana, terutama terkait fenomena hidrometeorologi seperti siklon tropis, banjir, dan tanah longsor. Menjadi tantangan besar dalam upaya penanggulangan bencana di DIY," ucap Kepala Pelaksana BPBD DIY Drs Noviar Rahmad MSi dalam sambutannya.

Dikatakan, kegiatan ini bertujuan menyusun dokumen rencana kontingensi yang efektif dan responsif terhadap potensi bencana siklon tropis di DIY. "Melalui konsultasi publik, berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan masukan, saran, dan persetujuan terhadap konsep operasi serta mobilisasi sumberdaya dalam penanggulangan bencana," tandasnya.

Diharapkan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder. "Hasil dari kegiatan ini dapat menghasilkan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Hidrometeorologi Siklon Tropis DIY yang komprehensif dan terimplementasi dengan baik dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang," ungkapnya.

Turut memberi sambutan Head of DRR, supply chain and Climate Resilience Katarina Kohutova. Kemudian Direktur Kesiapsiagaan BNPB Drs Pangarso Suryotomo MMB memberikan materi Arah dan Kebijakan terhadap Tindakan Cepat Tepat pada Situasi terhadap Potensi Bencana.

Sedang Koordinator Manajemen Pascabencana Kemenko PMK Merry Efriana SE MM memberikan materi Aspek Regulasi dan Pendanaan Terhadap Tindakan Cepat Tepat pada Situasi terdapat Potensi Bencana.

Dilanjutkan paparan Tim Penulis Konsep Renkon Hidrometeorologi oleh Suparlan memberikan paparan draf awal Renkon Hidrometeorologi Siklon Tropis di DIY dan M Taufiq AR : Peran Stakeholder Pentahelix dalam Renkon Bencana Hidrometeorologi Siklon Tropis di DIY. **(Vin)-f**

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

DEWAN TENGAH LAKUKAN KAJIAN

Pembangunan Infrastruktur Harus Munculkan Ungkitan Ekonomi

YOGYA (KR) - Pembangunan infrastruktur di Kota Yogya didorong agar mengedepankan konsep keberlanjutan. Salah satu aspek yang tidak boleh dipisahkan ialah pembangunan tersebut harus memunculkan ungkitan ekonomi baru di sekitarnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Yogya Cahyo Wibowo ST, mengungkapkan daya ungkit ekonomi yang bisa dirasakan oleh masyarakat akan berdampak positif atas hasil pembangunan infrastruktur. "Ada tiga hal yang tidak bisa dikesampingkan jika bicara tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Salah satunya ialah ungkitan ekonomi. Ini menjadi perhatian kami di komisi," ungkapnya.

Oleh karena itu jajaran Komisi C saat ini pun tengah melakukan kajian kaitannya dengan pembangunan infrastruktur kota yang berdampak pada ungkitan ekonomi. Kajian itu nantinya akan diwujudkan dalam naskah akademik sebagai dasar dalam meluncurkan rancangan peraturan daerah (raperda). Jika kelak lolos dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) maka akan dibahas menjadi produk hukum atau perda.

Cahyo yang juga anggota Fraksi PKS menambahkan, keberadaan perda sangat penting sebagai payung hukum yang mengikat. Dari situ nanti diturunkan menjadi peraturan walikota maupun keputusan walikota sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. "Kendala sekarang memang belum ada yang mengatur ungkitan ekonomi di balik infrastruktur. Akibatnya kami pun tidak bisa mendorong penganggarannya yang sebenarnya cukup dibutuhkan oleh masyarakat," imbuhnya.

Cahyo Wibowo ST
Komisi C

KR-Istimewa

Dicontohkan, pembangunan ruang terbuka hijau publik di wilayah sudah cukup gencar. Akan tetapi dalam hal pengelolaan masih menjadi tumpang tindih. Lain halnya jika di sana dibuka kran bagi warga yang hendak berjualan, maka akan muncul rasa memiliki untuk merawat fasilitas. Sehingga jika ada kerusakan warga ikut menyengkuyung perbaikan. Seperti halnya ruang terbuka hijau di Bendung Lepen Giwangan yang dikolaborasikan dengan kampung wisata setempat, ada UMKM yang terlibat dan masyarakat pun ikut merawat.

Selain ungkitan ekonomi, aspek lain yang harus dipenuhi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan ialah menyesuaikan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini agar infrastruktur yang dibangun memiliki fungsi yang jelas serta termanfaatkan secara optimal. Aspek terakhir yang juga harus terpenuhi ialah estetika. "Maksud estetika di sini tidak hanya fasad yang baik ketika dilihat tetapi juga harus diselaraskan dengan kawasan sekitar. Misalnya bangunan itu kokoh dan bagus tetapi ternyata di belakangnya ada kawasan kumuh. Ini menjadi tidak sinkron karena lingkungan sekitar juga perlu ditata agar memiliki daya dukung yang kuat," urainya. **(Dhi)-f**